

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia Sebagai negara berkembang Mempunyai tujuan di dalam pembangaunan nasional yaitu untuk masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil Maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertitik beratkan pada Pembangunan ekonomi, Tanpa mengesampingkan bidang lainnya Indonesia merupakan salah satu tujuan pokok yang menjadi landasan kuat didalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah Penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah lapangan kerja dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah merupakan tujuan utama dalam setiap pembangunan ekonomi (Panwaja, 2014). Suatu Perekonomian yang berkembang dengan pesat bukan jaminan terhadap suatu Negara tersebut dikatakan makmur bila tidak diikuti dengan perluasan Kesempatan kerja guna menampung tenaga kerja baru yang setiap setiap tahunnya memasuki dunia kerja(Sandika,2014). Masalah yang dihadapi ketenagakerjaan adalah jumlah penduduk usia produktif yang besar mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Peningkatan Jumlah Penduduk membawa konsekuensi pertambahan jumlah angkatan kerja (Dimas,2009). Tingginya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai akan menyebabkan pengangguran. Permasalahan tersebut, Pemerintah dan pengusaha dapat bekerja sama berusaha untuk mencari solusi dan memberikan perhatian yang lebih serius agar dapat menciptakan Lapangan pekerjaan yang layak (Manuaba 2016).

Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah (Suindyah, 2011) yang tepat Mengrarkan investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2006) yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju Pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidak seimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran yang meningkat akan mengakibatkan pemborosan sumberdaya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatkan beban masyarakat, sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans,2004).

Berdasarkan angka sementara proyeksi Sensus Penduduk (SP) Provinsi NTT merupakan semua orang yang bedomisili di wilayah teritorial Provinsi NTT. jumlah penduduk di Provinsi NTT dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi NTT Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2012	4.899.260
2013	4.953.967
2014	5.036.897
2015	5.120.061
2016	5.203.514

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi NTT dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana jumlah penduduk yang paling rendah pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk 4.899.260 Jiwa dan yang paling tinggi pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk 5.203.514 Jiwa.

Masalah yang dihadapi ketenagakerjaan meliputi pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahun, menyebabkan jumlah angkatan kerja juga meningkat. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut, jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, tentunya akan menciptakan pengangguran. Masalah pengangguran tersebut merupakan masalah yang serius dalam bidang tenaga kerja karena pengangguran telah lama dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan. Oleh karena itu penduduk yang besar dan terus bertambah tiap tahunnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan terutama penempatan tenaga kerja sebagai salah satu modal pembangunan.

Tabel 1.2
Data Pengeluaran Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi
Nusa Tenggara Timur 2012-2016

NO	Kabupaten /Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sumba Barat	310,686,008.00	404,694,785.00	4,159,000,424.00	552,830,396.00	713,846,652.00
2	Sumba Timur	574,405,671.00	702,409,582.00	753,163,056.00	897,350,761.00	1,174,726,399.00
3	Kupang	691,326,413.00	757,153,960.00	792,819,506.00	909,247,570.00	1,500,771,829.00
4	TSS	579,786,075.00	546,435,859.00	643,791,664.00	725,723,545.00	1,422,399,859.00
5	TTU	579,786,075.00	546,435,859.00	643,791,664.00	725,723,545.00	238,468,958.00
6	Belu	736,682,936.00	800,235,170.00	649,834,984.00	125,999,971.00	915,266,776.00
7	Alor	573,006,623.00	629,844,474.00	682,322,945.00	780,956,416.00	1,000,786,869.00
8	Lembata	465,833,146.00	514,430,014.00	471,681,645.00	597,365,529.00	888,587,239.00
9	Flores Timur	628,713,867.00	647,472,382.00	716,949,881.00	854,679,823.00	1,095,386,469.00
10	Sikka	609,684,080.00	659,543,267.00	737,090,223.00	895,239,798.00	1,205,123,789.00
11	Ende	614,515,172.00	649,418,833.00	737,234,528.00	920,349,548.00	1,358,378,599.00
12	Ngada	449,523,636.00	473,141,085.00	548,583,090.00	690,216,561.00	868,476,549.00
13	Manggarai	554,651,741.00	649,467,735.00	747,457,456.00	964,934,872.00	112,655,589.00
14	Rote Ndao	392,691,168.00	475,572,481.00	484,165,905.00	600,845,954.00	401,786,107.00
15	Manggarai Barat	463,946,000.00	506,230,171.00	603,330,379.00	752,180,222.00	897,529,377.00
16	Sumba Tengah	355,266,230.00	346,718,552.00	367,531,829.00	483,683,750.00	596,132,222.00
17	Sumba Barat Daya	355,939,921.00	468,601,743.00	491,321,624.00	736,692,823.00	916,139,204.00
18	Nagekeo	470,987,369.00	426,714,251.00	491,654,337.00	612,658,139.00	798,492,910.00
19	Manggarai Timur	575,269,166.00	506,635,671.00	532,724,419.00	634,127,242.00	883,422,625.00
20	Sabu Raijua	371,808,776.00	328,253,022.00	37,766,563.00	571,319,183.00	608,416,629.00
21	Kota Kupang	674,177,782.00	796,472,527.00	902,470,475.00	992,065,739.00	1,176,023,249.00

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas Menunjukkan bahwa Jumlah pengeluaran pemerintah Provinsi Nusan Tenggara Timur dari tahun ke tahun Mengalami Peningkatan setiap tahunnya. Dimana Pembelanjaan pemerintah yang paling rendah di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2016 dengan jumlah pembelanjaan 401,786,107 Rp per tahunnya dan yang paling tinggi pada tahun 2016 dengan jumlah pembelanjaan 1,176,023,249 Rp pertahunya di Kota Kupang.

Apabila dalam perencanaan APBD pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakan agar ada keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan prinsip dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga akan meningkatkan kemampuan dalam daerah bertambah dan ketergantungan pada bantuan keuangan luar daerah semakin berkurang.

Sebagai akibat dari struktur Penduduk berdasarkan latar belakang diatas, maka diadakan penelitian mengenai faktor apa dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun judul yang di pilih yaitu: “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi NTT**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pengaruh pengeluaran pemerintah, Belanja langsung, belanja tidak langsung secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi NTT?
2. Bagaimana Pengaruh pengeluaran pemerintah, Belanja langsung, belanja tidak Langsung secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga di Provinsi NTT?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh pengeluaran pemerintah, belanja langsung, belanja tidak langsung secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi NTT.
2. Untuk mengetahui Pengaruh pengeluaran pemerintah, Belanja Langsungsung, belanja tidak langsung secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi NTT.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Informasi hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah sarana pustaka berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan penyerapan tenaga kerja.

1.4.3 Bagi Akademik

Sebagai bahan informasi dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga Kerja.